



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUDDIN
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 105895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.007.108.570

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/80 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 92.412.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m²/160 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 524.790.000
3. Tanah Seluas 445 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 170.556.750
4. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 276.461.820
5. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m²/147 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 709.410.000
6. Tanah Seluas 1805 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 57.834.000
7. Tanah Seluas 1840 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 57.834.000
8. Tanah Seluas 2202 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 117.810.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 228.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000



3. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 99.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 267.763.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 123.900.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.626.771.570

III. HUTANG Rp. 398.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.228.771.570

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.